



EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ERA COVID-19 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Hana Maryana¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang menimpa seluruh Negara di dunia, terlebih dengan terjadinya wabah pandemi covid-19 semakin membuat kemiskinan meningkat ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang terjadi lantaran perekonomian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat tidak efektif dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Terdapat tiga faktor yang menghambat keefektifan dari Program Keluarga Harapan yaitu: 1) Database penerima bantuan dana PKH tidak selalu diperbaharui sehingga menyebabkan bantuan dana PKH kurang tepat sasaran, 2) Penyesuaian Besaran Bantuan PKH Pada Masa Covid-19 Belum Sepenuhnya Memberikan Manfaat sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam tercapainya tujuan PKH. 3) KPM PKH Masih Kesulitan Mengakses Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Fasilitas Pendidikan (Fasdik) Pada Masa Covid-19.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, kemiskinan

Abstract

Poverty is a crucial problem that affects all countries in the world, especially with the occurrence of the Covid-19 pandemic, poverty has increased, marked by an increase in the number of poor people who occur because the economy cannot run properly. This study aims to describe and analyze government policies in the form of the Family Hope Program in an effort to reduce poverty rates in Ngamprah District, West Bandung Regency. This study uses a qualitative approach with data collection

techniques carried out through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Family Hope Program in reducing poverty rates in Ngamprah District, West Bandung Regency is not effective as seen from the indicators put forward by Sutrisno, namely Program Understanding, Right on Target, Right on Time, Achievement of Goals and Real Change. There are three factors that hinder the effectiveness of the Family Hope Program, namely: 1) The database of PKH fund recipients is not always updated, causing PKH fund assistance to be less targeted, 2) Adjustments to the Amount of PKH Assistance During the Covid-19 Period Have Not Fully Provided Benefits so that this becomes an obstacle in achieving PKH goals. 3) PKH Beneficiaries Still Have Difficulty Accessing Health Facilities (Faskes) and Education Facilities (Fasdik) During Covid-19.

Keywords: *Effectiveness, Program Keluarga Harapan, Poverty.*

PENDAHULUAN

Pembangunan berkaitan erat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas untuk dapat terciptanya suatu kesejahteraan pada masyarakat. Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan bahwasannya dalam di bentuknya Negara Indonesia serta pemerintah Negara Indonesia satu diantaranya yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut memiliki arti bahwasanya pemerintah bertanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri, salahsatunya yakni dalam menanggulangi fenomena kemiskinan. Tujuan pembangunan dalam kehidupan masyarakat ialah untuk meningkatkan daya perekonomian sehingga dapat terciptanya lapangan kerja serta membenahi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik juga memadai untuk seluruh rakyat yang nantinya dapat menciptakan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional ialah menyurutkan skala kemiskinan. Pada masa globalisasi seperti sekarang ini, angka kemiskinan semakin meningkat terlebih dengan adanya bencana pandemi Covid-19. Kemiskinan merupakan masalah utama serta tantangan besar bagi setiap Negara di dunia, tidak saja Negara berkembang namun jua di Negara maju. Kemiskinan merupakan suatu patologi atau

penyakit dalam ekonomi, sehingga dalam hal tersebut perlu untuk disembuhkan atau paling tidak dapat dikurangi.

Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan tersebut. Upaya yang diusahakan baik berbentuk kebijakan berupa program langsung ataupun tidak langsung, kebijakan program yang bersifat langsung yakni program yang diberikan langsung kepada warga miskin, seperti; “Program Keluarga Harapan (PKH)”, “BLT”, “Raskin” dan lainnya, lalu program yang bersifat tidak langsung, seperti “program Jamkesmas”, “program IDT” dan juga “BOS”. Meskipun telah dilaksanakan banyak usaha, tetapi kemiskinan sulit dihilangkan secara keseluruhan yang berarti kemiskinan secara mudah dapat ditemui nyaris semua kawasan, termasuk perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut dapat terlihat dari angka kemiskinan Indonesia yang masih tinggi mencapai 25,22 juta (9,03%) (BPS, Per Maret 2024).

Salah satu program bantuan yang dicanangkan pemerintah dan diharapkan dapat mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program nasional yang dijalankan oleh Kementerian Sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Komponen PKH meliputi pendidikan dan kesehatan yang difokuskan pada keluarga sangat miskin, diharapkan dengan adanya program PKH terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat memutuskan atau paling tidak mengurangi mata rantai kemiskinan.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan untuk memperluas jangkauan kepada KPM sehingga anak usia sekolah dapat mengakses fasilitas pendidikan terdekat (fasdik) dan ibu hamil serta anak balita dapat mengakses fasilitas kesehatan (faskes) guna menjaga kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang dan arahan Presiden Republik Indonesia Nawacita, manfaat PKH juga diperluas kepada lansia dan

penyandang disabilitas. PKH terarah agar menjadi *center of excellence* atau pusat unggulan dan mengupayakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, oleh karenanya upaya dalam membentuk sinergi antara program perlindungan sosial dan pemberdayaan terul dilakukan demi mencapai kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dan penelitian ini menganalisis dengan menggunakan sifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk melihat beberapa data dari buku harian, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya yang ada di Kecamatan Ngamprah. Teknik yang digunakan untuk menguji kualitas data adalah teknik triangulasi (*triangulate*) untuk memastikan apakah proses dan hasil yang diperoleh telah dipahami dengan baik oleh peneliti sesuai dengan keinginan. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu teori indikator efektifitas program yang saling berkaitan yaitu teori Sutrisno (2007:125-126) yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Era Covid-19 Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

1. Pemahaman Program

Pemberian bantuan Program Keluarga Harapan harus selaras

dengan pemahaman masyarakat mengenai PKH, hal tersebut merupakan hal mendasar yang dapat menentukan keberhasilan PKH kedepannya. Pemahaman terhadap program keluarga harapan diukur dari seberapa baik masyarakat memahami konsep program tersebut. Oleh karenanya pemerintah kecamatan secara rutin sebulan sekali mengadakan pertemuan dengan peserta PKH, namun selama pandemi kegiatan tersebut cukup terhambat karena adanya pembatasan sosial untuk mengurangi penyebaran virus corona yang menyerang dunia.

Di Kecamatan Ngamprah sendiri pendamping PKH yang tersedia ada 11 orang, jadi sistem yang digunakan di kecamatan ngamprah dan upaya pengoptimalisasian keefektivan PKH ialah dengan rasionalisasi yakni per pendamping memegang 350 penerima manfaat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) jika dalam satu desa terdapat lebih dari 350 KPM berarti harus ada dua pendamping di desa tersebut hal tersebut dilakukan agar tercapainya tujuan PKH yang menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat kecamatan ngamprah, selain itu terdapat pula sanksi jika KPM tidak berkomitmen Di Kecamatan Ngamprah, wawancara dengan masyarakat mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta memahami konsep program keluarga harapan, dengan beberapa peserta memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan, hak, kewajiban dan sanksi yang mungkin berlaku jika tidak mematuhi. Dalam mengukur keefektifan pemahaman program di Kecamatan Ngamprah dapat dikatakan cukup efektif. Dengan demikian, indikator pemahaman program ini berjalan efektif dan dapat diandalkan untuk program keluarga harapan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

2. Tepat Sasaran

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngamprah pada masa *covid-19* tidak jauh berbeda dari sebelumnya yaitu dipilih dari masyarakat yang sangat rentan dan

telah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu juga harus memenuhi komponen PKH seperti Komponen Kesehatan (ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun), Komponen Pendidikan (SD, SMP, SMA) dan Komponen Kesejahteraan Sosial (Lansia dan disabilitas berat). Pada masa *covid-19* terdapat kebijakan baru yakni penambahan nilai bantuan sebanyak 25% dari total penerimaan bantuan yang dibagi pada saat pencairan, setelah masa tersebut habis dilakukan penyesuaian kembali menyesuaikan kebijakan dalam kategori yang sama. Namun disisi masyarakat masih terdapat kecemburuan sosial karena pemberian bantuan PKH ini terkadang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi, mereka yang sudah mapan, mempunyai warung namun tetap mendapat bantuan sedangkan yang benar membutuhkan tidak, terkadang masih banyak Keluarga Miskin yang membutuhkan tidak mendapat bantuan sehingga sasarannya kurang tepat.

3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu proses pencairan menjadi hal krusial bagi peserta PKH, karena bantuan sosial diberikan setiap tiga bulan dan ditransfer langsung ke rekening bank mereka agar mudah di akses di ATM, ketepatan waktu ini menjadi penting karena merupakan salah satu pendapatan utama mereka. Sebelum adanya pandemi Covid-19 penyaluran dan PKH hampir selalu tepat waktu dan jarang mengalami hambatan karena melalui rekening masing masing, namun saat pandemi kerap terjadi keterlambatan dari pusat karena melalui pos namun masih di periode bulan yang telah ditentukan.

Selama pandemi terdapat peningkatan jumlah KPM PKH dikarenakan kemerosotan ekonomi masyarakat yang kemudian disebut dengan KPM Perluasan, penyaluran bantuan KPM perluasan diawali dengan pendistribusian KKS dengan mekanisme yang bervariasi, pendistribusian KKS dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melibatkan

perbankan untuk menyalurkan hingga ke desa/kelurahan atau kecamatan, hal tersebut dilakukan guna menghindari kerumunan dengan mendistribusikan KKS secara langsung.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dalam proses pencairan tidak terlalu memiliki masalah yang signifikan hanya sesekali jika pencairan melalui pos terlebih pada saat pandemi *Covid-19* menciptakan kerumunan yang cukup berdesakan sehingga dapat berdampak negatif bagi kesehatan selebihnya sudah cukup sesuai dan apabila terjadi permasalahan langsung diselesaikan sesegara mungkin oleh pendamping dan pihak yang terkait.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan program dapat dilihat melalui keselarasan antara capaian program dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan layanan sosial di masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Pencapaian tujuan tersebut juga dapat dilihat dari kinerja pelaksana indikator khususnya pendamping PKH, sebab implementator atau pelaksana program keluarga harapan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan sasaran PKH. Pendamping PKH diimbau untuk sentiasa menjaga transparansi dan memastikan peserta PKH tidak dirampas hak-haknya. Pendamping PKH juga harus membuat laporan yang merinci salahsatunya merupakan hasil dari terselenggaranya PKH yang terlaksana apakah sudah terlaksana sesuai dengan tujuannya atautah tidak.

Menurut hasil survei lapangan, diketahui bahwa selama pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, peserta bantuan PKH telah mendapatkan haknya berupa bantuan dana tanpa potongan tunai serta bantuan pangan lengkap bagi peserta PKH terlebih dimasa pandemi *Covid-19* yang mana ekonomi masyarakat

menurun karena adanya phk masal juga pembatasan pertemuan menjadikan masyarakat yang sebelumnya mulai mandiri dengan membuka umkm kembali kesulitan karena harus menutup usahanya tersebut. Terkait dengan capaian pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang menunjang kualitas hidup keluarga di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sudah berjalan dengan cukup baik contohnya seperti adanya posyandu (pemeriksaan terhadap balita, ibu hamil dan menyusui juga lansia) pelayanan kesehatan ini dilaksanakan setiap sebulan sekali. Selama masa pandemi posyandu tersebut ditiadakan karena adanya wfh sehingga masyarakat diharuskan mendatangi puskesmas jika sakit atau ada pemeriksaan itupun dibatasi jumlahnya. Demikian pula dengan pendidikan, pendamping berperan dalam menumbuhkan pembelajaran kepada peserta dalam mendidik anak agar anak sukses dan berhasil di sekolah, saat pandemi para siswa beradaptasi menghadapi cara baru dalam belajar yakni melalui daring, hal tersebut cukup menyulitkan masyarakat miskin karena tidak mempunyai media untuk melakukan pertemuan sekolah online seperti *handphone*, *ipad* ataupun laptop, sehingga terkadang masyarakat miskin tersebut menumpang kepada tetangganya agar dapat tetap belajar.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan hal yang paling krusial dalam berjalannya pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan karena perubahan nyata ini dalam suatu program menunjukkan sejauh mana keberhasilan program tersebut, bentuk dari perubahan yang dirasakan seseorang atau kelompok terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan. Perubahannya nyata dan dapat dirasakan dapat berdampak positif ataupun negatif tergantung pada proses pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak terkait sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penyesuaian bantuan selama pandemi covid-19 naik hingga 25 %, namun hal tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan bagi KPM, khususnya bagi mereka yang mendapat bantuan lebih sedikit. Bagi KPM yang hanya memiliki satu komponen anak SD, misalnya bantuan yang diterima hanya meningkat dari Rp.180.000,- menjadi Rp.225.000,- per triwulan atau Rp.75.000,- per bulan. Nilai tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bantuan sosial lainnya dalam rangka mitigasi dampak pandemi covid-19 seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) yang memberikan bantuan Rp.600.000,- per bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya diantara bantuan yang lain pada saat pandemi, PKH berada di kondisi yang paling sulit dalam menghadapi dampak pandemi. Bantuan yang didapat setiap bulannya lebih membantu KPM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sedangkan untuk kebutuhan lainnya dirasa masih kurang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyaluran dana PKH ini banyak masyarakat yang merasa terbantu dalam perekonomiannya juga dapat membantu meringankan beban mereka karena saat pandemi masyarakat kesulitan mencari pekerjaan sehingga sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH ini meski bagi sebagian masyarakat yang memiliki beban cukup banyak seperti banyaknya anak masih merasa kesulitan karena tidak semua anak mendapatkan bantuan dana PKH, Berdasarkan indikator ini, dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat belum efektif bagi sebagian masyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid-19 di Kecamatan Ngamprah terhadap penanggulangan kemiskinan

1. Database penerima bantuan dana PKH tidak selalu diperbaharui sehingga menyebabkan bantuan dana PKH kurang tepat sasaran

Hal ini dikarenakan data dalam DTKS yang tidak selalu

terupdate pada saat verifikasi data Calon Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Ngamprah pada masa Covid-19, masih ditemukan sejumlah KPM Perluasan yang tidak tepat sasaran dikarenakan kurang validnya sumber data.

2. Penyesuaian Besaran Bantuan PKH Pada Masa Covid-19 Belum Sepenuhnya Memberikan Manfaat

Dibandingkan dengan komposisi anggota keluarga, besaran bantuan yang diterima hanya mencapai setengah dalam pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga, hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan jumlah penerima bantuan setiap satu keluarga sedangkan jumlah rata-rata KPM lebih dari jumlah yang ditentukan sehingga dengan bantuan yang diterima tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Penyesuaian frekuensi pencairan bantuan PKH memungkinkan KPM untuk mendapatkan kepastian menerima uang tunai setiap bulan, tetapi kurang memberi tambahan manfaat, terutama bagi KPM yang nilai bantuannya kecil.

3. KPM PKH Masih Kesulitan Mengakses Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Fasilitas Pendidikan (Fasdik) Pada Masa Covid-19

Selama pandemi covid-19, KPM PKH masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, padahal kedua hal itu merupakan pokok utama tujuan PKH. Faskes yang tujuan utamanya ialah untuk ibu hamil, anak usia dini, lansia dan penyandang disabilitas berat lalu Fasdik diperuntukan bagi anak sekolah dari SD, SMP, SMA mengalami kesulitan dikarenakan perubahan proses pengajaran yang beralih menuju daring sedangkan tidak semua dari mereka memiliki akses untuk memiliki benda tersebut sehingga menghambat proses pendidikan karena tidak menerima pendidikan sedangkan rumah mereka berada di jarak yang cukup terpencil membuat tenaga pendidik kesulitan untuk menjangkau rumah mereka.

KESIMPULAN

Efektivitas Program Keluarga Harapan berdasarkan indikator

Pemahaman program di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada saat pandemi covid-19 dapat dikatakan sudah efektif dilihat dari sebagian besar peserta KPM mengetahui hak-hak serta kewajiban dasar mereka terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Lalu dari indikator Tepat sasaran di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada saat pandemi covid-19 dapat dikatakan belum efektif, hal tersebut dapat dilihat pada saat observasi lapangan bhawasannya masih terdapat masyarakat rentang yang sangat membutuhkan namun namanya tidak terdaftar sedangkan mereka yang mampu menghidupi diri malah mendapat bantuan, hal ini disebabkan oleh kesalahan pada saat awal pendataan ataupun sistem pendataan yang tidak efektif. Dan indikator Tepat waktu di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada saat covid-19 dapat dikatakan sudah sesuai namun belum terlalu efektif, dilihat dari cara yang dipakai, pada saat belum terjadi pandemi dan saat terjadi pandemi terkadang dalam beberapa kali pencairan menggunakan pos sedangkan wabah covid-19 mengharuskan tidak boleh terjadi kerumunan, selebihnya dikarenakan menggunakan rekening masing-masing sehingga proses pencairan berjalan cepat dan tidak terlalu banyak kendala. Lalu dari indikator Tercapainya tujuan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada saat covid-19 dapat dikatakan belum efektif, karena dilihat dari hasil yang terjadi di lapangan tujuan PKH ialah untuk merubah kehidupan perekonomian masyarakat sedangkan yang terjadi masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan menghidupi dirinya serta keluarganya dikarenakan bantuan yang diterima tidak mencukupi faktor lainnya. Dan indikator Perubahan nyata di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada saat covid-19 dapat dikatakan belum efektif, dapat dilihat dari masih sedikitnya masyarakat yang keluar dari zona kemiskinan, adapun yang sudah bisa di graduasi namun yang bersangkutan tidak mau, hal tersebut

menjadi pr bagi pemerintah untuk meyakinkan masarakat agar mau keluar dari zona nyaman yakni serba diberi sedangkan mereka hanya tinggal menerima.

Sedangkan hambatan efektivitas PKH di Kecamatan Ngamprah pada masa pandemi covid-19 adalah Belum Validnya Data KPM PKH Perluasan Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Verifikasi di Lapangan hal ini dikarenakan data dalam DTKS yang tidak selalu terupdate pada saat verifikasi. Penyesuaian Besaran Bantuan PKH Pada Masa Covid-19 Belum Sepenuhnya Memberikan Manfaat karena dibandingkan dengan komposisi anggota keluarga, besaran bantuan yang diterima hanya mencapai setengah dalam pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga, hal tersbeut dikarenakan adanya pembatasan jumlah penerima bantuan setiap satu keluarga sedangkan jumlah rata-rata KPM lebih dari jumlah yang ditentukan sehingga dengan bantuan yang diterima tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. KPM PKH Masih Kesulitan Mengakses Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Fasilitas Pendidikan (Fasdik) Pada Masa Covid-19 yang selama pandemi covid-19, KPM PKH masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, padahal kedua hal itu merupakan pokok utama tujuan PKH. Faskes yang tujuan utamanya ialah untuk ibu hamil, anak usia dini, lansia dan penyandang disabilitas berat lalu Fasdik diperuntukan bagi anak sekolah dari SD, SMP, SMA mengalami kesulian dikarenakan perubahan proses pengajaran yang beralih menuju daring sedangkan tidak semua dari mereka memiliki akses untuk memiliki benda tersebut sehingga menghambat proses pendidikan karena tidak menerima pendidikan sedangkan rumah mereka berada di jarak yang cukup terpencil membuat tenaga pendidik kesulitan untuk menjangkau rumah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barlian, Eri. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Padang: Sukabina Press.
- Gunawan. W. Kamus Ilmu Pemerintahan. (Jakarta: Bee Media Pustaka. 2020), 346.
- Kemensos RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2020 Op.cit.Hlm.1
- Lincoln Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 238.
- Liliweri, Alo. 2008. Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moh. Prabu Tika, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 129.
- Mardiasmo.(2017). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mestika, Zed. Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. Ke-1, 2004.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. hlm 73. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal

- Budiani, Ni Wayan. Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol.2, No.1, 2007: Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Bali: Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Udayana.
- Mustafa Hasbar dan Agung Wijaya, “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pendekatan Strategy SWOT Analysis Di Kabupaten Enrekang”(E-Jurnal, 2016), 19-20.
- Parnamian, J. (2010). Efektivitas Komunikasi antara Rumah Tangga Sangat Miskin Penerima Bantuan Tunai dan Pendamping Program Keluarga Harapan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Subagyo dan Wito, A. 2000. Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan : Studi Kasus Di Kabupaten Kediri Jawa Timur. UGM.